



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : DEPARTEMEN PENGADAAN STRATEGIS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUBINTORO**
2. Jabatan : **KEPALA DEPARTEMEN**
3. NHK : **126244**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 9.901.000.000**

1. Tanah Seluas 50000 m2 di KAB / KOTA KONAWA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah Seluas 951 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/288 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.950.000.000
4. Tanah Seluas 80000 m2 di KAB / KOTA KONAWA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 990 m2/150 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 625.000.000
7. Tanah Seluas 592 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.776.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 594.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, TOYOTA CAMRY SEDAN Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
3. MOBIL, MERCEDES BEENZ E300 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 2.821.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.573.001.600
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	15.889.001.600
III. HUTANG	Rp.	283.285.672
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	15.605.715.928

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.